

Williamson Index Approach And Class Typology In Analysis Of Regional Economic Inequalities In The Pursuit Of Sustainable Development Goals In North Sumatra

Pendekatan Index Williamson Dan Tipologi Klassen Dalam Menganalisis Ketimpangan Ekonomi Daerah Dalam Upaya Mewujudkan SDGs Di Sumatera Utara

M. Ryansyah^{1*}, Reni Ria Armayani Hasibuan², Aqwa Naser Daulay³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

ryansyahmuhammad02@gmail.com¹, reniriaarmayani@uinsu.ac.id²,

aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

The Williamson Index is used to determine the level of inequality between regencies/cities in the East Coast region. Economic growth in each district or city on the East Coast of North Sumatra is classified using the Klassen typology. This research uses data from the Central Statistics Agency, which is available in the form of secondary data from 2017 to 2022. The analytical tools used in this research are the Klassen Typology and the Williamson Index. The results of the research show that the Williamson Index figures throughout North Sumatra Province, especially in Regencies/Cities located in the East Coast Zone during the research period, are in the moderate inequality category with an average of 0.37, which indicates that development inequality is decreasing or greater equality of development. Meanwhile, the classification of regions based on the Klassen Typology is: fast progressing (Labuhanbatu Regency, South Labuhanbatu Regency, and North Labuhanbatu); developed depressed (Medan City and Batubara Regency); growing fast (Asahan Regency); relatively underdeveloped (Serdang Berdagai Regency, Langkat Regency, Deli Serdang Regency, Tanjung Balai City, Tebing Tinggi City and Binjai City). So that regions that are in the Fast Developing and Fast Growing Classification will be able to implement the SDGs compared to regions that are relatively underdeveloped.

Keywords: Inequality, Williamson Index, Klassen Typology

ABSTRAK

Index Williamson digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar Kabupaten/Kota kawasan Pantai Timur. Pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten atau kota di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara diklasifikasikan menggunakan tipologi Klassen. Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, yang tersedia dalam bentuk data sekunder dari tahun 2017 hingga 2022. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipologi Klassen dan Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka Indeks Williamson di seluruh Provinsi Sumatera Utara, terutama di Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Zona Pantai Timur selama periode penelitian, berada dalam kategori ketimpangan taraf sedang dengan rata-rata 0,37 yang menandakan bahwa ketimpangan pembangunan semakin berkurang atau pemerataan pembangunan semakin besar. Sedangkan untuk pengklasifikasian daerah berdasarkan Tipologi Klassen yaitu: cepat maju (Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara); maju tertekan (Kota Medan dan Kabupaten Batubara); berkembang cepat (Kabupaten Asahan); relatif tertinggal (Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi dan Kota Binjai). Sehingga daerah yang berada di Klasifikasi Cepat maju dan cepat tumbuh akan mampu melaksanakan SDGs dibandingkan dengan daerah yang relatif tertinggal.

Kata Kunci: Ketimpangan, Index Williamson, Tipologi Klassen

1. Pendahuluan

Pembangunan serta pertumbuhan ekonomi sejak dahulu sudah menjadi fokus dan tujuan dasar dalam perekonomian suatu negara, karena dapat digambarkan melalui kuantitatif dengan cara membandingkan pertumbuhannya dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006). Menurut (Nugroho, 2014), Pendapatan per kapita yang meningkat dengan cepat dibandingkan tahun sebelumnya disebut pertumbuhan ekonomi. Sekarang ini, pembangunan ekonomi telah dipandang dari banyak indikator maupun dimensi yang mencakup seperti perubahan atas sikap masyarakat, struktur sosial serta pemerintahan. Selain memfokuskan pada tingkat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan serta ketimpangan (Todaro, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara berkembang terkadang tidak dibarengi dengan pemerataan pembangunan sehingga banyak kasus terjadi ketimpangan pembangunan (disparity). Adam

dalam (Suri & Aprilia, 2017) menjelaskan bahwa terdapat dua aspek utama dan saling berkaitan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output (GDP) total. Pengukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Ketimpangan yang terjadi pada daerah relative tertinggal dengan daerah relative maju merupakan imbas dari akibat proses industrialisasi dan perubahan struktur ekonomi, sehingga pihak swasta ataupun pemerintahan cenderung melakukan investasi kepada daerah yang relatif maju. Akibatnya, menimbulkan kecemburuan sosial daerah relatif tertinggal pada daerah relatif maju. Menurut Sjafrizal (2017) Struktur dan pola letak, serta pemusatan kegiatan ekonomi antar tempat (ekonomi spasial) di suatu wilayah, menjadi penyebab utama terjadinya perbedaan ekonomi antar wilayah. Distribusi kegiatan ekonomi antar tempat memang memiliki pengaruh kepada keunggulan dari tempat atau daerah masing-masing, yang cenderung memusatkan kegiatan ekonomi, menentukan struktur dan pola tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian (Dwiwahju, 2016) tentang Ketimpangan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Bondowoso tahun 2006-2012. Yang mana dari analisis Dwiwahju ditemukan bahwa angka IW atau ketimpangan di Kabupaten Bondowoso adalah sangat tinggi dan cenderung naik. Tahun 2006 sebesar 0.75790 dan tahun 2016 sebesar 0.92104.

Indonesia berkomitmen terhadap *sustainable development*, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi keinginan dan cita-cita generasi manusia saat ini tanpa membahayakan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi tersebut di masa mendatang atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan (Hasibuan, 2020). Menurut Emil Salim dalam (Rahadian, 2016) Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi pribadi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Sustainable Development* memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan pembangunan baik pada masyarakat sekarang ini maupun masyarakat di generasi berikutnya. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam melakukan Pembangunan yang berkelanjutan yaitu aktif melakukan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) RKPD Zona Pantai Timur. Di Sumatera Utara, ada lima prioritas pembangunan yang dilakukan pada tahun 2021, yaitu peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM) unggul, peningkatan akses pendidikan tinggi, penghubung pusat pertumbuhan daerah dan pusat produktivitas, peningkatan nilai tambah di sektor pertanian, dan promosi pariwisata ramah lingkungan. (Muhammad, 2020)

Sebuah provinsi yang berbatasan dengan laut dan samudera disebut Provinsi Sumatera Utara. Batas utaranya dibentuk oleh Provinsi Aceh, batas timurnya oleh Negara Malaysia, batas selatannya oleh Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, dan batas baratnya dibentuk oleh Samudera Hindia. Berdasarkan lokasi dan atribut geografisnya, Sumatera Utara dibagi menjadi tiga wilayah: Dataran Tinggi, Pantai Barat, dan Pantai Timur. Di Pantai Barat terdapat beberapa kabupaten, yaitu Nias, Nias Barat, Nias Utara, Tapanuli Selatan, Mandiling Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, dan Kota Padang. Di Dataran Tinggi terdapat Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, dan Pematang Siantar. Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Langkat, Serdang Berdagai, Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Medan, dan Binjai terletak di wilayah pantai timur. Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada tahun 2022 didominasi oleh Provinsi Riau dengan kontribusi 23,50%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi 22,63%, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan kontribusi 14,02%. Setelah 2 (dua) tahun lebih pandemic Covid-19 melanda, perbaikan perekonomian mulai terjadi disemua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Secara y-on-y, Provinsi Sumatera Utara memiliki pertumbuhan sebesar 4,73 persen, sedangkan pulau sumatera tumbuh sebesar 4,69 persen. (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023)

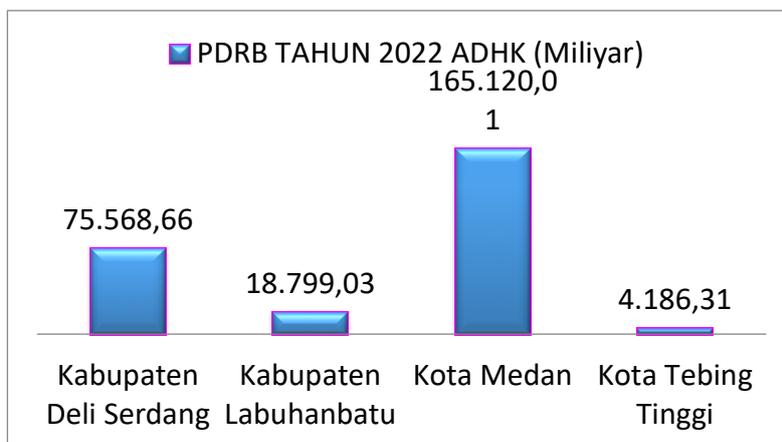
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara cenderung meningkat secara kumulatif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada tahun 2022 PDRB Sumatera Utara ADHK 2010 sebesar Rp. 573,53 triliun. Di Provinsi Sumatera Utara, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDRB) sebesar 25,97 persen. Industri pengolahan menempati urutan kedua dengan 17,41 persen. PDRB per Kapita Sumatera Utara tahun 2022 ADHK 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu Rp. 36,67 juta menjadi Rp. 37,94 juta (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023b). Provinsi Sumatera Utara tidak akan lepas dari masalah ketimpangan walaupun pertumbuhan perekonomian Sumatera Utara mengalami peningkatan dan mendominasi perekonomian pulau Sumatera setelah Provinsi Riau.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar)

| No | Kabupaten/Kota | PDRB Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur | | | | | |
|----|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Asahan | 23.525 | 24.844 | 26.245 | 26.299 | 27.279 | 28.550 |
| 2 | Batubara | 22.034 | 22.998 | 23.998 | 23.923 | 24.486 | 25.482 |
| 3 | Deli Serdang | 64.991 | 68.340 | 71.878 | 70.596 | 71.173 | 75.568 |
| 4 | Labuhanbatu | 21.048 | 22.112 | 23.232 | 23.252 | 24.147 | 25.305 |
| 5 | Labuhanbatu Selatan | 16.907 | 17.797 | 18.750 | 18.899 | 19.620 | 20.549 |
| 6 | Labuhanbatu Utara | 15.602 | 16.413 | 17.259 | 17.306 | 17.969 | 18.799 |
| 7 | Langkat | 26.822 | 28.170 | 29.597 | 29.343 | 30.247 | 31.665 |
| 8 | Serdang Berdagai | 17.516 | 18.421 | 19.393 | 19.308 | 19.863 | 20.749 |
| 9 | Kota Binjai | 7.309 | 7.708 | 8.133 | 7.984 | 8.162 | 8.503 |
| 10 | Kota Medan | 139.739 | 148.007 | 156.780 | 153.669 | 157.689 | 165.120 |
| 11 | Kota Tanjung Balai | 5.174 | 5.473 | 5.790 | 5.763 | 5.898 | 6.131 |
| 12 | Kota Tebing Tinggi | 3.575 | 3.760 | 3.954 | 3.926 | 4.024 | 4.186 |

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017-2022

Berdasarkan (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023b) PDRB ADHK dalam miliar per kabupaten/kota yang berada dikawasan Pantai Timur tahun 2022 pada tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten dengan PDRB tertinggi adalah Kabupaten Deli Serdang sebesar 75.568,66 dan kabupaten dengan PDRB terendah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara Sebesar 18.799,03. Untuk Kota di kawasan Pantai Timur, Kota Medan memiliki PDRB tertinggi sebesar 165.120,01 sedangkan Kota dengan PDRB terendah adalah Kota Tebing Tinggi sebesar 4.186,31. Dengan memiliki selisih yang lumayan tinggi antara Kabupaten/Kota PDRB tinggi dengan Kabupaten/Kota PDRB rendah sehingga hal ini mengindikasikan terjadi ketimpangan pendapatan atau ekonomi antar Kabupaten/Kota dikawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 1. Perbandingan Kabupaten/Kota dengan PDRB Tertinggi dan Terendah
 Sumber: Data diolah, 2023

Didasarkan pada masalah ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten atau kota berdasarkan klasifikasi analisis tipologi kelas. Penelitian juga akan menyelidiki tingkat index Williamson atau ketimpangan ekonomi dari tahun 2017 hingga 2022 untuk setiap kabupaten atau kota yang terletak di wilayah atau wilayah pantai timur Sumatera Utara sehingga hasil penelitian ini harapannya dapat berguna bagi akademisi atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan datang. Dari permasalahan dan tujuan diatas mendorong penulis dalam melakukan penelitian dengan judul "Pendekatan Index Williamson dan Tipologi Klassen Dalam Menganalisis Ketimpangan Ekonomi Daerah Dalam Upaya Mewujudkan SDGs di Sumatera Utara".

2. Tinjauan Pustaka

Teori Pembangunan Ekonomi

Arsyad dalam (Ambar et al., 2021) memberikan penjelasan tentang proses pembangunan ekonomi daerah yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat didalam daerah tersebut untuk mampu memanfaatkan berbagai sumber daya maupun potensi yang ada dalam daerah tersebut, menciptakan hubungan Kerjasama antara sektor public dan swasta dalam membantu memakmurkan masyarakat di daerah tersebut dengan menciptakan lapangan kerja baru. Seiring dengan pertumbuhan produksi, pembangunan ekonomi juga melibatkan perubahan distribusi input di berbagai sektor ekonomi dan struktur output. Akibatnya, meskipun pembangunan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan biasanya disertai dengan keduanya.

Mewujudkan kehidupan yang baik, atau al-hayat at-tabiyyah, adalah tujuan pembangunan ekonomi Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: "Wahai kaumku, sembahlah Allah; tidak ada Tuhan selain Dia; Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya; jadi, mohonlah ampunan kepada-Nya dan bertobatlah kepada-Nya. (QS. Hud 11: Ayat 61)

Dua makna ayat ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah al-wajib, atau kewajiban manusia untuk mengelola bumi sebagai sumber daya pertanian dan untuk pembangunan. Yang kedua adalah perintah Allah kepada umat manusia untuk membantu membangun dunia secara keseluruhan. Ayat 15 Al-Mulk juga membahas pembangunan ekonomi, dengan kata-kata berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk 67: Ayat 15)

Ada kewajiban bagi umat manusia untuk memberikan sumbangan, atau infaq, dan membangun sarana yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kewajiban tersebut. Selain itu, hukum juga harus membangun sarana yang mendukung pelaksanaan kewajiban ini.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Dalimunthe & Imsar (2023), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan jumlah dan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Beberapa indikator yang termasuk dalam pertumbuhan ekonomi seperti: kenaikan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan penurunan tingkat kemiskinan. Jika tindakan ekonomi warga suatu negara secara langsung menghasilkan peningkatan produk dan

jasa, maka perekonomian negara tersebut dapat dianggap mengalami pertumbuhan. (Leasiwal, 2022).

Pertumbuhan ekonomi juga harus bisa dicapai dalam waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang merupakan tujuan utama yang sebisa mungkin ingin dicapai oleh ekonomi, dan harus sekonsisten mungkin dengan pertumbuhan jangka pendek saat ini. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dijelaskan dan diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi fiskal suatu negara disebut pertumbuhan ekonomi, yang mencakup (1) peningkatan produksi produk industri; (2) pembangunan infrastruktur; dan (3) peningkatan produksi yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, seperti satu tahun. (Ambar et al., 2021). Adapaun beberapa faktor yang menjadi indikator dalam lambatnya pertumbuhan ekonomi: seperti korupsi, laju inflasi, tingkat suku bunga, kenaikan harga minyak dan situasi keamanan yang tidak kondusif (Hasibuan, 2020). Menurut para pakar ekonom klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor: populasi, total stok barang modal, wilayah geografis dan sumber daya alam, dan tingkat teknis. (Afdillah et al., 2015). Menurut Islam, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai tren berkelanjutan yang dihasilkan dari penggunaan komponen produksi yang signifikan dan menguntungkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, Islam menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai ciri penting. Karena Menurut Islam, pembangunan ekonomi itu multidimensi dan menekankan standar kuantitatif serta kualitatif dan tujuannya bukan hanya kesejahteraan materi global, tetapi juga kesejahteraan dunia dan akhirat (Nasution et al., 2023).

Teori Ketimpangan

Menurut Sjafrizal (2017) Struktur, pola, dan konsentrasi kegiatan ekonomi antar tempat (ekonomi spasial) di suatu wilayah sebagian besar menjadi penyebab perbedaan ekonomi antar wilayah. Struktur dan pola ini didasarkan pada bagaimana kegiatan ekonomi tersebar di seluruh wilayah, yang sangat dipengaruhi oleh keunggulan geografis setiap lokasi, yang cenderung memusatkan kegiatan ekonomi. Indeks Williamson, yang dia gunakan dalam penelitiannya di pertengahan abad ke-20, adalah alat pertama untuk mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah (Williamson, 1965). Koefisien variasi merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur perbedaan dalam statistik. Ungkapan "Indeks Williamson" mulai digunakan sebagai penghormatan kepada Jeffrey G. Williamson, yang menemukan metode untuk mengukur ketimpangan pembangunan daerah. Meskipun indeks ini memiliki sejumlah kelemahan, termasuk fakta bahwa indeks ini peka terhadap bagaimana wilayah didefinisikan untuk penghitungan, indeks ini sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan daerah (Sjafrizal, 2017). Indeks Williamson dihitung berdasarkan pendapatan per kapita regional dan jumlah penduduk. Dengan menggunakan indeks ini, kita dapat mengetahui tingkat ketimpangan yang ada antara wilayah tertentu. Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di wilayah tersebut semakin tinggi, dan sebaliknya.

Menurut (Sjafrijal, 2018) peningkatan konsentrasi kegiatan ekonomi di beberapa tempat biasanya mengarah pada transmisi pertumbuhan ekonomi lintas wilayah yang tidak seimbang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hirschman (1958). Sumber fundamental dari keadaan ini adalah konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi, yang disebabkan oleh jangkauan manfaat lokasi yang cukup luas antar lokasi. Sjafrijal dalam (Pebriani, 2022), Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan menjadikan suatu daerah atau wilayah mengalami ketimpangan adalah persediaan sumber daya alam dan kondisi demografis meliputi Sumber daya manusia (tenaga kerja), pengalokasian dana pembangunan dalam bentuk investasi pemerintah maupun swasta serta mobilitas sektor barang dan jasa konsentrasi perekonomian. Beberapa macam perbedaan ini yang menjadikan pembangunan di setiap wilayah atau daerah menjadi berbeda. Sehingga pada setiap daerah atau wilayah akan terdapat wilayah yang relatif tertinggal (Underdeveloped Region) dan Wilayah maju (Developed Region). Oleh karena itu Pola dan

struktur pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dapat digambarkan dengan alat analisis Tipologi Klassen dan mengklasifikasikan menjadi empat kuadran, sehingga dapat membantu daerah yang relatif tertinggal untuk berkembang demi dapat mengurangi ketimpangan.

Teori SDGs

Dalam konteks SDGs, poin pertama yang ditekankan adalah penghapusan kemiskinan (no poverty) sebagai prioritas utama. Ini berarti bahwa komunitas global telah menyepakati untuk menghilangkan segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pengurangan kemiskinan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, seperti pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan yang baik, kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pemberantasan kelaparan, akses terhadap energi bersih yang terjangkau, dan masih banyak lagi. Seluruh tujuan ini saling terhubung dan saling mempengaruhi, menjadikan kemitraan yang penting dalam mencapainya (Andri Soemitra, 2018).

Mengimplementasikan target-target SDGs merupakan fokus utama dalam pembangunan nasional, yang membutuhkan kerja sama yang sinergis antara kebijakan perencanaan nasional, provinsi, dan kota. Di tingkat nasional, tujuan SDG telah diintegrasikan dengan baik ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui program, kegiatan, dan indikator yang dapat diukur, dan ada bukti bahwa dana telah disediakan. (Bappenas, 2019).

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini disajikan secara deskriptif kuantitatif bersama-sama dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Pendekatan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis Index Williamson Dan Tipologi Klassen Dalam Menganalisis Ketimpangan Ekonomi Daerah Dalam Upaya Mewujudkan SDGs Di Sumatera Utara. Dalam penelitian deskriptif kuantitatif, kejadian yang dapat diamati diperiksa dan dijelaskan dalam istilah numerik, dan diambil kesimpulan data-data atau angka-angka tersebut. Penelitian deskriptif kuantitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu; melainkan hanya menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan fakta (angka) sebagaimana adanya (Sulistyawati et al., 2022). Tempat penelitian ini adalah di provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten/Kota yang masuk kedalam Zona Pantai Timur. Waktu penelitian ini adalah tahun dari tahun 2017-2022.

Data dan Sumber Data

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi BPS Provinsi Sumatera Utara dan setiap kabupaten atau kota di wilayah pantai timur. Data ini mencakup PDRB, PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk dari tahun 2017 hingga 2022.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penulis memberikan batasan definisi operasional agar dapat menghindari perbedaan penafsiran dengan menyatukan pemahaman tentang variabel-variabel yang digunakan, sebagai berikut:

1. Disparitas pembangunan ekonomi regional adalah perbedaan dalam pembangunan ekonomi yang terjadi di antara beberapa kabupaten atau kota di Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara.
2. Daerah diklasifikasikan menurut tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita berdasarkan kuadran struktur pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
3. Laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB setiap kabupaten atau kota.

4. Dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita: PDRB setiap kabupaten, kota, atau Provinsi Sumatera Utara diukur dengan membagi seluruh penduduknya setiap tahun dengan harga konstan dalam jutaan rupiah per kapita mengukur nilai.
5. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara merupakan penjumlahan dari seluruh satuan jiwa yang bertempat tinggal di setiap kabupaten atau kota.

Teknik Analisis Data

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan ekonomi antar kabupaten dan kota yang terlibat dalam penelitian ini. Selain itu, analisis Index Williamson digunakan untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara.

Index Williamson (V_w)

Index Williamson digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui tingkat ketimpangan di Kabupaten/kota kawasan Pantai Timur Sumatera Utara (Nugroho, 2014) dengan rumus:

$$VW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \quad \text{yaitu } 0 < VW < 1$$

Keterangan:

VW = Index Williamson

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota i

Y = PDRB per kapita kawasan pantai timur Sumatera Utara

F_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i

N = Jumlah penduduk Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara

Jika hasil perhitungan Index Williamson dan ditemukan bahwa: VW mendekati angka satu maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di wilayah pantai Timur tinggi dan bila VW mendekati angka nol maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten wilayah pantai timur Sumatera Utara rendah (Sjafrijal, 2017)

Klassen Typologi

Tipologi Klassen adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui pola laju pertumbuhan ekonomi di antara kabupaten/kota di wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara. Dalam tipologi Klassen, kabupaten/kota di wilayah pantai timur dibagi menjadi empat kuadran: Kuadran I adalah kabupaten/kota Cepat Maju dan Cepat Tumbuh (dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendapatan tinggi), Kuadran II adalah kabupaten/kota Maju Tertekan (dengan pendapatan tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi yang rendah, Kabupaten/kota dalam kuadran III (tiga) adalah yang berkembang pesat tetapi memiliki pendapatan rendah, dan kuadran IV (empat) adalah yang relatif tertinggal.

| R | y _i < y | y _i > y |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| r _i > r | Berkembang Pesat | Cepat Maju dan Cepat Tumbuh |
| r _i < r | Relatif Tertinggal | Maju Tertekan |

Keterangan:

r_i = Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota i

r = Laju pertumbuhan rata-rata PDRB Kabupaten/Kota Pantai Timur Sumatera Utara

y_i = Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota i

y = Pendapatan per Kapita rata-rata Kabupaten/Kota Pantai Timur Sumatera Utara

4. Hasil Dan Pembahasan

Perhitungan Index Williamson

Nilai Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk dalam wilayah kabupaten/kota merupakan pendugaan yang digunakan untuk menghasilkan nilai pendugaan distribusi rata-rata yang dikenal dengan indeks Williamson. Untuk periode 2017–2022, digunakan angka PDB per kapita berdasarkan harga konstan. Menurut analisis Indeks Williamson, distribusi pendapatan per kapita semakin merata jika Indeks Williamson mendekati nol. Dalam penelitian ini, Williamson dan Sjafrizal (2008) melihat hubungan antara perbedaan wilayah dan kemajuan ekonomi.

Indeks Williamson memiliki rentang 0 sampai 1. Jika nilai indeks Williamson mendekati nol, maka ketimpangan pembangunan berkurang, atau pemerataan pembangunan semakin besar. Jika hasil Indeks Williamson mendekati 1 (satu), maka tingkat ketimpangan semakin besar, dan pembangunan semakin tidak merata. Menurut indikatornya, semakin naik indeks Williamson, semakin besar disparitasnya; Sebaliknya, jika semakin kecil, pembangunan akan lebih terbagi rata.

Menurut Oshima dalam (Firdhaus et al., 2019) Ada tiga kategori ketimpangan, dengan nilai IW > 0,5. Kategori sedang memiliki nilai IW = 0,5-0,35 dan kategori rendah memiliki nilai IW di bawah < 0,35.

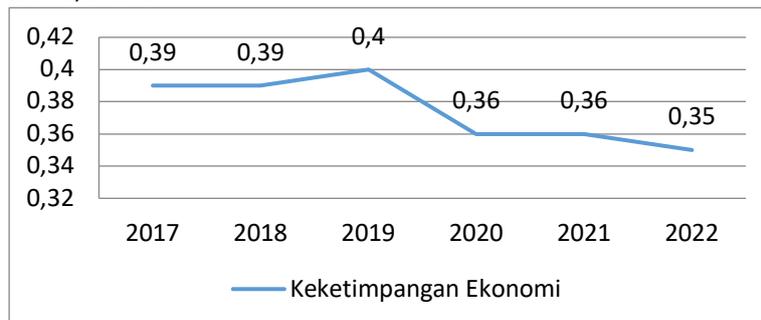
Tabel 2. Index Williamson Kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara

| Tahun | Index Williamson | Kriteria |
|------------------|-------------------|---------------|
| 2017 | 0,390757603 | Sedang |
| 2018 | 0,396497446 | Sedang |
| 2019 | 0,402168301 | Sedang |
| 2020 | 0,361376396 | Sedang |
| 2021 | 0,360057273 | Sedang |
| 2022 | 0,358340941 | Sedang |
| Rata-rata | 0,37819966 | Sedang |

Sumber: Data diolah, 2023

Dilihat pada Tabel 2, Ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara lintas kabupaten dan kota dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tergolong disparitas/ketimpangan yang signifikan, sehingga dimungkinkan untuk mengklaim bahwa ekonomi tersebar lebih merata antara kabupaten dan kota.

Walaupun pada tahun 2019 nilai *Index Williamson* mengalami kenaikan menjadi 0,40 dari tahun sebelumnya, namun berdasarkan kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa ketimpangan di Kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata nilai Index Williamson sebesar 0,37819.



Gambar 2. Trend Index Williamson Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Analisis Tipologi Klassen

Untuk menggambarkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota, Analisis Tipologi Klassen akan digunakan untuk membagi kawasan pantai timur Provinsi Sumatera Utara menjadi empat kuadran. dengan rata-rata PDRB per kapita ditunjukkan sebagai sumbu horizontal (X) dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi ditunjukkan sebagai sumbu vertikal (Y).

Tabel 3 menunjukkan klasifikasi struktur antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah antar daerah kabupaten/kota di wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari perhitungan Tipologi Klassen.

Tabel 3. Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klasen

| NO | Kabupaten/Kota | Rata-rata PDRB perkapita (Juta) | Rata-rata pertumbuhan (%) | Klasifikasi Daerah |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Asahan | 34.746.032 | 3,97 | Berkembang Pesat |
| 2 | Batubara | 57.625.884 | 2,97 | Maju Tertekan |
| 3 | Deli Serdang | 34.537.294 | 3,10 | Relatif Tertinggal |
| 4 | Labuhan Batu | 46.888.610 | 3,77 | Cepat Maju Cepat Tumbuh |
| 5 | Labuhan Batu Selatan | 57.706.558 | 4,00 | Cepat Maju Cepat Tumbuh |
| 6 | Labuhan Batu Utara | 46.078.001 | 3,81 | Cepat Maju Cepat Tumbuh |
| 7 | Langkat | 28.313.812 | 3,40 | Relatif Tertinggal |
| 8 | Serdang Berdagai | 30.095.480 | 3,47 | Relatif Tertinggal |
| 9 | Kota Binjai | 27.968.545 | 3,11 | Relatif Tertinggal |
| 10 | Kota Medan | 64.952.772 | 3,44 | Maju Tertekan |
| 11 | Kota Tanjung Balai | 32.471.585 | 3,48 | Relatif Tertinggal |
| 12 | Kota Tebing Tinggi | 23.111.067 | 3,30 | Relatif Tertinggal |
| Kawasan Pantai Timur | | 40.473.637 | 3,49 | |

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 4. Matrix Tipologi Klassen Tahun 2017-2022

| | $y_i < \bar{y}$ | $y_i > \bar{y}$ |
|-----------------|---|--|
| $r_i > \bar{r}$ | Kuadran III 1. Kabupaten Asahan | Kuadran I 1. Labuhanbatu 2. Labuhanbatu Selatan 3. Labuhanbatu Utara |
| $r_i < \bar{r}$ | Kuadran IV 1. Serdang Berdagai 2. Langkat 3. Deli Serdang 4. Kota Tanjung Balai 5. Kota Tebing Tinggi 6. Kota Binjai | Kuadran II 1. Kota Medan 2. Kabupaten Batubara |

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2022, Kabupaten/Kota Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara berada dalam kuadran I, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang cepat dan cepat, dan memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Kota Medan dan Kabanjahe berada dalam kuadran II, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang lambat tetapi pendapatan perkapita lebih tinggi.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) di semua kabupaten dan kota di Kawasan Pantai Timur, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara harus menggunakan

klasifikasi tipologi daerah saat menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah. Misalnya, agar daerah dikategorikan sebagai maju dan cepat berkembang, kebijakan dan program pembangunan daerah harus lebih berkonsentrasi pada pembangunan sektor ekonomi dan sosial serta bisnis yang menggunakan modal teknologi modern dan intensif, seperti sektor industri dan jasa. Untuk daerah maju yang mengalami kesulitan, kebijakan dan inisiatif pembangunan daerah harus dirancang dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkontribusi pada daerah tersebut. Jika klasifikasi daerah berkembang cepat, kebijakan dan program pembangunan daerah harus dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menekankan potensi ekonomi daerah. Jika klasifikasi daerah relatif tertinggal, upaya untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru harus diprioritaskan.

5. Penutup Kesimpulan

Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa, sejak enam tahun terakhir, tingkat ketimpangan antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, terutama di Zona Pantai Timur, telah menurun. Karena itu, nilai Index Williamson rata-rata sebesar 0,39 pada tahun 2017 dan turun menjadi 0,35 pada tahun 2022. Nilai rata-rata selama periode penelitian 2017–2022 adalah sebesar 0,37, dengan kategori ketimpangan sedang. Dengan menggunakan data laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita tahun 2017–2022, analisis tipologi kelas kabupaten/kota di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara membagi daerah menjadi empat kategori. Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang cepat, sementara Kota Medan dan Kabupaten Batubara mengalami kemajuan yang lamban. Kabupaten Asahan juga berkembang cepat, dan Kabupaten Serdang Berdagai, Langkat, Deli Serdang, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, dan Binjai relatif tertinggal.

Disarankan agar pemerintah daerah membuat kebijakan pembangunan daerah untuk setiap kabupaten atau kota di Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Ini akan melibatkan menilai keterbelakangan infrastruktur fisik, penciptaan lapangan kerja, dan program peningkatan kualitas SDM di setiap kabupaten atau kota. Selain itu, saran kebijakan kepada pemerintah daerah harus berupa pembangunan infrastruktur penghubung sistem transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ketimpangan ekonomi lintas wilayah akan berkurang jika saran ini dipraktikkan karena perdagangan dan pergerakan komponen terkait produksi secara alami akan berjalan dengan lancar. Dalam pendekatan ini, daerah tertinggal juga akan dapat mendorong aktivitas perdagangan dan investasi, yang pasti akan menghasilkan aktivitas dan peluang kerja yang lebih besar, yang kemudian dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Afdillah, Y., Harahap, I., & Marliyah. (2015). *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi* (1st ed.). FEBI UIN-SU Press.
- Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. . (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten / Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 21(1), 1–12.
- Andri Soemitra. (2018). *Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*. [http://repository.uinsu.ac.id/5061/1/Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals %28SDGs%29.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5061/1/Peran%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20oleh%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro%20Syariah%20dalam%20Perspektif%20Sustainable%20Development%20Goals%28SDGs%29.pdf)
- Bappenas. (2019). *Sekilas SDGs*. Website. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>

- BPS Provinsi Sumatera Utara. (2023a). *Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2022*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. (2023b). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Dalimunthe, A. H., & Imsar, I. (2023). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Islamic Human Development Index (I-Hdi) di Indonesia. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1), 118–132. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.198>
- Dwiwahju, S. (2016). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012*. 1(1), 33.
- Firdhaus, M. F., Badjuri, & Suswandi, P. E. (2019). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (JEK)*, III(1), 28–34.
- Hasibuan, R. R. A. (2020). *Perekonomian Indonesia* (1st ed.). FEBI UIN-SU Press.
- Leasiwal, T. C. (2022). *Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Variabel Makro Ekonomi*. CV. Mitra Cendikia Media.
- Muhammad, H. (2020). *Pembangunan Kawasan Timur Tingkatkan Perekonomian*. Republika.
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam. *Journal of Geometry*, 114(2). <https://doi.org/10.1007/s00022-023-00684-4>
- Nugroho, B. S. (2014). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 7(1), 46–59. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3842>
- Pebriani, M. (2022). *Analisis Disparitas Ekonomi Antar Kabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2011-2020*.
- Rahadian, A. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, III(01), 46–56.
- Sjafrijal. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers.
- Sjafrijal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan edisi 2*. Kencana Prenada Media Grup.
- Sulistyawati, W., Wahyudi, & Trinuryono, S. (2022). Analisis (Deskriptif Kuantitatif) Motivasi Belajar Siswa Dengan Model Blended Learning di Masa Pandemi Covid19. *Kadikma, Vol. 13, N*, 68–73.
- Suri, & Aprilia, K. (2017). *Tipologi Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Menggunakan Multidimensional Scalling di Pulau Timor*.